

SKRIPSI

MENGUNGKAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID AL-MUWAHIDDIN KOTA BIMA

DIAN SARI



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

MENGUNGKAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID AL-MUWAHIDDIN KOTA BIMA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**DIAN SARI
A031171703**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

MENGUNGKAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID AL-MUWAHIDDIN KOTA BIMA

disusun dan diajukan oleh

DIAN SARI
A031171703

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 November 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si
NIP. 19630515 199203 1 003

Pembimbing II



Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com
NIP. 19880421 201903 2 015



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M. Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM
NIP. 19660405 199203 2003

SKRIPSI

MENGUNGKAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID AL-MUWAHIDDIN KOTA BIMA


disusun dan diajukan oleh

DIAN SARI
A031171703

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 November 2021** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Abdul hamid Habbe, S.E., M.Si	Ketua	1..... 
2.	Hermita Arif, S.E., CFP.,M.Com	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	3..... 
4.	Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M. Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM
NIP. 19660405 199203 2003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : DIAN SARI

Nim : A031171703

Jurusan/Program Study : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 November 2021

Yang membuat pernyataan,



DIAN SARI

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada bapak Hamid Prof. Dr. H.Abdul Hamid Habbe, S.E.,M.Si dan ibu Hermita Arif, S.E.,CIFP.,M.Com sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Dosen Penguji, Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E.,Ak.,MM.,CPMA dan ibu Rahmawati H.S, S.E.,Ak.,M.Si,CA
2. Seluruh bapak dan ibu dosen departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan nasehat mulai dari awal studi hingga penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhusus buat pak Ical, pak Richard, dan pak Safar yang telah membantu memudahkan peneliti selama kuliah hingga mendapat gelar S.E.
4. Ayah tercinta, Bapak Syamsuddin yang menjadi lelaki pekerja keras serta menjadi inspiratif peneliti termasuk dalam mewujudkan cita-cita bersama yaitu melihat anaknya memakai toga.
5. Ibu tercinta, ibu srikomala yang telah sabar dan tak kenal lelah menemani disaat peneliti sakit dan rela buang-buang waktu dan tenaga bolak balik Bima Makassar untuk menemani peneliti.
6. Saudara-saudara tercinta, Nurfaizillah, Firda, zahra, yang telah memberikan *support* untuk peneliti dalam menyelesaikan studinya.
7. Bibi Nurlailah yang telah banyak membantu mengurus pendaftaran beasiswa Afirmasi Dikti (ADik) 3T sehingga peneliti bisa merasakan

banyak manfaat dari beasiswa ini dan memberikan banyak masukan serta nasehat kehidupan selama kuliah.

8. Muharrikah Dakwah MDI dan Keluarga Besar SAKI yang telah memberikan doa terbaik dan dukungan untuk peneliti.
9. Murobbiyah tercinta, Kak Rasmi, Kak Ayu, dan Kak Darmawali yang telah memberikan banyak ilmu dan juga nasihat untuk peneliti sehingga peneliti tetap semangat dan sabar untuk berjuang dalam dunia dakwah dan akademik.
10. Sahabatku tercinta, Inar, Hikmah, Fira, Pitra, Kamel, ATG, kak Jannah, kak Aslinda, kak Rika dan Utari atas doa terbaik dan ukhuwahnya untuk peneliti.
11. Teman-teman Afirmasi 3T se-Indonesia yang tergabung dalam grup inti afirmasi yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti, juga kepada teman-teman afirmasi 3T Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman Squad 17 Bima-Makassar yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.
13. Teman-teman yang pernah satu sekolah dengan peneliti mulai dari SD sampai SMA yang telah memberikan banyak pengalaman hidup sehingga menjadi proses pendewasaan bagi peneliti.
14. Kepada seluruh saudariku di setiap Fakultas yang telah berjuang dalam jalan dakwah bersama peneliti terima kasih atas kebersamaan dan perjuangannya. Semoga Allah menjaga diri-diri kita dan senantiasa diistiqamahkan.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 20 November 2021



Peneliti

ABSTRAK

Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima

Disclosing the Financial Management Accountability of Masjid Al-Muwahiddin Bima City

Dian Sari
Abdul Hamid Habbe
Hermita Arif

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid Al-Muwahiddin Kota Bima. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi untuk menggali informasi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid. Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pengurus masjid yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana masjid. Selain itu peneliti menggunakan data sekunder, data yang berupa laporan keuangan masjid dan juga melalui studi pustaka seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus masjid melakukan pencatatan keuangannya secara sederhana, yaitu hanya sekedar catatan rincian pemasukan dan pengeluaran masjid. Pengurus masjid tidak terlalu akuntabel dalam mengelola keuangan masjid karena hanya menyampaikan catatan keuangannya melalui toa dan papan informasi masjid, tidak menyampaikan catatan keuangan masjid kepada donatur masjid yang berada di luar kota Bima.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima, Tidak Akuntabel

This study aims to disclose the financial management accountability of the Al-Muwahiddin masjid in Bima City. This study is a qualitative study using phenomenological methods to extract information related to the accountability of mosque financial management. The data source of this research is using primary data, the data were obtained from the results of interviews conducted by researchers with mosque administrators who are responsible for managing mosque funds. In addition, researchers used secondary data, data in the form of mosque financial reports and also through literature studies such as scientific journals, reference books, literature and other sources. The results showed that the mosque management kept its financial records in a simple way, which is just a record of the details of the mosque's income and expenses. The mosque administrator is not very accountable in managing the mosque's finances because it only conveys its financial records through the toa and mosque information boards. not submitting mosque financial records to mosque donors who are outside the city of Bima.

Keywords: Financial Management Accountability, Al-Muwahiddin Masjid in Bima City, Not Accountable

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teori	7
2.1.1 Teori Akuntabilitas dan Akuntabilitas Publik.....	7
2.1.2 Landasan Syariah Akuntabilitas.....	10
2.1.3 Akuntabilitas dalam Islam	12
2.2 Akuntabilitas Masjid	14
2.3 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	16
2.4 Penelitian Terdahulu	18
2.5 Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Rancangan Penelitian	23
3.2 Lokasi Penelitian	23
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.3.1 Jenis Data.....	23
3.3.2 Sumber Data	24
3.4 Metode Pengumpulan Data	25
3.5 Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN	28

4.1	Gambaran Umum Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima	28
4.1.1	Sejarah Singkat	28
4.1.2	Visi dan Misi Masjid	30
4.1.3	Susunan Kepengurusan.....	30
4.1.4	Aktivitas Kegiatan Masjid	45
4.2	Sumber Dana	46
4.3	Pemaknaan Akuntabilitas Pengurus Masjid dan Masyarakat	53
4.4	Akuntabilitas dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Masjid	58
BAB V	PENUTUP	67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4.1 Susunan Kepengurusan Masjid Al-Muwahiddin	33
Gambar 4.2 Proses Penerimaan Sumbangan dari Kotak Infaq.....	48
Gambar 4.3 Proses Penerimaan Sumbangan dari Dermawan	49
Gambar 4.4 Proses Penerimaan Sumbangan dari Yayasan	50
Gambar 4.5 Proses Pengeluaran Kas.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Laporan Keuangan Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1	72
Lampiran 2	73
Lampiran 3	78
Lampiran 4	79
Lampiran 5	80
Lampiran 6	81
Lampiran 7	82
Lampiran 8	83
Lampiran 9	84
Lampiran 10	85
Lampiran 11	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 222 juta jiwa atau sebesar 87% dari total penduduk (Muslimpro, 2020). Dengan banyaknya populasi muslim tersebut, maka harus didukung dengan tempat ibadah/masjid yang memadai. Ketua Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa terdapat 800.000 masjid dan mushollah yang tersebar di Indonesia dan terbanyak di dunia. Bima merupakan salah satu daerah yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga tidak heran jika terdapat banyak tempat ibadah/masjid yang terletak di Bima. Hal ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 bahwa terdapat 118 Masjid dan 119 musholah yang terletak di kota Bima, serta 411 masjid dan 397 musholah yang terletak di Kabupaten Bima. Sehingga total tempat ibadah untuk umat islam yang terletak di Bima yaitu sebanyak 1.045 (bimakab.bps.go.id). Seiring berkembangnya zaman, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, namun sering dijadikan sebagai wadah untuk menuntut ilmu agama maupun kegiatan ritual keagamaan lainnya seperti akad nikah, perayaan maulid nabi, serta kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh tokoh agama dimana membahas terkait isu-isu yang sementara berkembang di kalangan masyarakat.

Organisasi yang bergerak di bidang peribadatan merupakan organisasi nirlaba (Bastian, 2007). Organisasi nirlaba merupakan organisasi layanan publik yang dikelola langsung oleh masyarakat dengan tujuan tidak mengambil keuntungan sebesar apapun. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari

para donatur yang memberikan sumbangannya tanpa mengharapkan imbalan apapun baik itu berupa barang maupun jasa. Hal yang menjadi pembeda antara organisasi keagamaan yang termasuk dalam organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya yaitu pada aspek seperti sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur keorganisasian, anggaran serta tujuan dari masjid itu sendiri. Esensi dibangunnya masjid yaitu sebagai pusat kegiatan umat muslim untuk membentuk kekuatan dan kesejahteraan umat Islam. Oleh karena itu diperlukan manajemen sumber daya dan pengelolaan keuangan yang baik karena hal ini berdampak pada berjalannya program-program masjid yang telah di rancang oleh pengelola masjid tersebut supaya visi dan misi masjid bisa terlaksana dengan baik. Dengan adanya sumber dana yang sebagian besarnya berasal dari donasi jama'ah maka apabila keuangan masjid tidak dikelola dengan baik maka tidak ada rasa tanggung jawab dan akuntabilitas serta jiwa amanah dalam diri para pengurus masjid.

Masjid merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang menyediakan sarana untuk umat islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik di laksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani

adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat secara penuh.

Akuntabilitas pelaporan keuangan suatu lembaga masjid sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola masjid kepada para donatur. Akuntabilitas adalah suatu keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Suatu lembaga pelayanan publik yang menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, akan berdampak positif terhadap respon dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Salah satu lembaga peribadatan bagi umat Islam di kota Bima yaitu masjid Al-Muwahiddin di jalan Kartini Kecamatan Rasanae Barat Kelurahan Paruga. Masjid ini merupakan masjid terbesar yang terletak di Bima. Masjid ini telah melakukan pembangunan dan renovasi sejak beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini pembangunan serta renovasi belum selesai. Secara umum sumber dana masjid diperoleh dari sumbangan beberapa pihak internal seperti sedekah, infaq, hibah, bantuan pemerintah, bantuan swasta dan usaha ekonomi. Hal ini menjadi pembeda antara sumber dana masjid sebagai entitas nirlaba dengan entitas bisnis lainnya. Semua dana masjid yang sudah terkumpul akan digunakan untuk pemenuhan kegiatan operasional masjid, sehingga semakin besar dana masjid yang terkumpul maka diharapkan akan semakin variatif program masjid yang dijalankan.

Secara praktik akuntabilitas keuangan masjid Al-Muwahiddin Bima, diumumkan setiap hari jum'at dimana pengurus masjid mengumumkan arus keluar masuk kas selama satu pekan terakhir dan juga diumumkan berapa saldo akhir dari masjid tersebut. Selain diumumkan setiap hari jum'at, laporan

keuangan masjid juga disampaikan melalui papan informasi masjid tersebut sehingga jama'ah masjid bisa mengetahui arus keluar masuk kas serta saldo akhir keuangan masjid melalui papan informasi yang tersedia di lingkungan masjid (www.bimakini.com). Walaupun demikian, masyarakat sekitar masih kurang yakin dengan adanya transparansi dari pengelola masjid sehingga disarankan agar menyajikan laporan keuangan yang bersifat harian, bulanan, ataupun tahunan agar penyajian laporan keuangan masjid dinilai lebih akuntabilitas

Banyaknya dana yang masuk pada pengelola masjid, maka pelaporan keuangan masjidpun harus secara akuntabel disampaikan kepada masyarakat. Hal ini yang akan dikaji dalam penelitian dimana fokus penelitiannya adalah mengetahui bagaimana pemaknaan akuntabilitas dari pengelola masjid Al-Muwahiddin Bima dan masyarakat sekitar masjid yang juga menjadi donatur masjid tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka adapun beberapa rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari mana sumber dana yang diperoleh Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima?
2. Bagaimana pemaknaan akuntabilitas bagi pengurus masjid dan masyarakat sekitar?
3. Bagaimana akuntabilitas dan pelaporan pengelolaan keuangan dari Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan sumber dana yang diperoleh Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima
2. Menganalisis dan membandingkan makna akuntabilitas menurut pengurus masjid dan masyarakat sekitar
3. Menganalisis akuntabilitas dan Pelaporan pengelolaan keuangan dari Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola masjid untuk menerapkan sifat amanah dan terbuka kepada orang/pihak yang berwenang.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk peneliti selanjutnya serta menjadi acuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai akuntabilitas pada pengelolaan keuangan di masjid.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memaparkan mengenai beberapa teori dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, menguraikan secara

singkat penelitian terdahulu, serta memaparkan kerangka pemikiran secara hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan penjelasan mengenai rancangan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan validasi data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan topik yang sedang diteliti.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian, saran, dan keterbatasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Akuntabilitas dan Akuntabilitas Publik

Kusumastito (2014) mengartikan akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan untuk menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung-jawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Akuntabilitas juga sering diartikan sebagai keterbukaan pengelola lembaga dalam mempertanggung jawabkan kegiatan dan program kerja yang telah dilaksanakan. Suatu pengelola lembaga sangat diwajibkan untuk memiliki jiwa amanah serta keterbukaan ketika menjalankan dan melaporkan suatu program kegiatan dan laporan keuangannya, karena dengan modal tersebut suatu lembaga bisa dipercaya oleh para pemangku kepentingan (stakeholder).

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisional, akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Arifiaya, 2008). Sedangkan menurut Mckinsey dan Howard dalam Akdon menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu keadaan ketika seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan, dan pada kenyataannya memang dibatasi oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan dari instrumen pengendalian eksternal,

termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan (Akdon, 2006).

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian (Simanjuntak dan Junarsi dalam Hanafi, 2015).

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Sedangkan menurut sjamsuddin (2017) akuntabilitas adalah menjawab tanggung jawab seseorang, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, merespon, memikul kewajiban dan menetapkan keputusan eksternal. Menurut pendapat lain bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat prinsipal (Mahmudi dalam Hanafi, 2015).

Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Dimana akuntabilitas vertikal yaitu akuntabilitas atau bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang lebih tinggi dimana kalau di akuntansi konvensional itu tanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi yaitu otoritas tertinggi dari lembaga publik tersebut, namun di akuntansi syariah akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas atau tanggung jawab kepada sang pencipta atau Allah azza wa jalla, akuntabilitas vertikal juga berupa nilai keimanan yang tercermin dari kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga publik tersebut, dalam

hal ini yaitu masjid. Sedangkan akuntabilitas horizontal yaitu suatu bentuk akuntabilitas dan pertanggung jawaban kepada sesama manusia atau kepada lembaga lainnya. Akuntabilitas horizontal juga dapat berupa nilai pendidikan, tolong menolong, kerja sama serta nilai ekonomi yang ditampakkan oleh lembaga publik.

Muhamad dalam Nurjannah (2018) menjelaskan bahwa prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh dan ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Menurut Ellwood dalam Noor (2018) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya markup dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber

inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Menurut Endang dalam Amir (2018) yang mengutip pernyataan Effendi, prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten.
- c. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- d. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dan manajemen organisasi dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.2 Landasan Syariah Akuntabilitas

1. Al-Qur'an

- a. Q.S Al-Mudassir:38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya

b. Q.S Yaasin:12

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَاهُمْ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Artinya: Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

c. Q.S An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

d. Q.S Al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui

2. Hadits

a. Hadits Riwayat Bukhari

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

Artinya: "Tanda orang munafik ada tiga; Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkari, dan jika dipercaya ia khianat." (H.R Bukhari)

b. Hadits Riwayat Ahmad

قَالَ الرَّسُولُ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak Amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji." (HR. Ahmad)

c. Hadits Riwayat Muslim

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « أُرْبِعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانُ مُنَافِقًا خَالِصًا . وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr bin al-Ash radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah bersabda yg maksudnya : “Ada empat perkara, barangsiapa yang empat perkara itu semuanya ada di dalam dirinya, maka orang itu adalah seorang munafik yang murni yakni munafik yang sebenar-benarnya dan barangsiapa yang di dalam dirinya ada satu perkara dari empat perkara tersebut, maka orang itu memiliki pula satu macam perkara dari kemunafikan sehingga ia meninggalkannya, iaitu: jikalau dipercaya berkhianat, jikalau berbicara berdusta, jikalau berjanji dia tidak tepati dan jikalau bertengkar maka ia berbuat kecurangan yakni tidak melalui jalan yang benar lagi.” (H.R Muslim)

2.1.3 Akuntabilitas dalam Islam

Islam tidak memberikan sebuah teori komprehensif di bidang akuntansi, namun tetap menyediakan seperangkat pedoman umum yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan mendasar dari manajemen yang tidak mendasar pada materialis (Abuznaid dalam Januar, 2017). Akuntabilitas menurut hukum Islam adalah cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hukum sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu juga akuntansi dalam pandangan Islam adalah semua yang terkait aturan positif dan memberikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi keridhoan Allah dan mengikuti ajaran Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan akuntansi dan manajemen Islam tidak hanya berorientasi pada unsur duniawi dan yang berfokus pada keuntungan yang berupa uang, tapi lebih fokus untuk mencari keberkahan Allah.

Akuntabilitas dalam prespektif islam yaitu bentuk petanggungjawaban yang tidak hanya kepada kepala perusahaan namun juga pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan kepada manusia. Dalam akuntablitas islam kita sangat

dituntut untuk memiliki sikap amanah karena amanah adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pengelola lembaga pelayanan publik. Tanpa adanya sifat ini, maka lembaga pelayanan publik akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari orang/pihak yang menjadi donatur dari lembaga pelayanan publik tersebut karena dana yang dikelola adalah dana yang bersumber dari para donatur yang berasal dari lembaga pemerintahan maupun swasta. Orang ataupun pihak yang menjadi donatur pada umumnya setelah memberikan dananya kepada pengelola tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya kembali. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari pengelola lembaga pelayanan publik yang bertanggungjawab memastikan perilaku pengurus sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

Selanjutnya yang menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

1. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Dalam Al-Qur'an sangat jelas memaparkan terkait akuntabilitas, misalnya kata hisab diulang lebih dari delapan kali dalam ayat yang berbeda. Hisab merupakan makna dari perhitungan, yang artinya berkaitan dengan kewajiban pertanggungjawaban setiap muslim kepada Allah atas segala hal yang berkaitan dengan usaha yang telah dilakukannya. Jadi kesamaan mendasar antara hisab dalam Islam dan akuntansi terletak pada tanggung jawab setiap muslim untuk melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Demikian pula, dalam perusahaan bisnis, manajemen dan pemilik modal bertanggung jawab

atas tindakan mereka baik di dalam maupun di luar perusahaan mereka. Muslim harus beritikad baik dalam dimensi religius dan sekuler, dan tindakan mereka selalu terikat dengan syariah hukum Islam sehingga mewujudkan suatu tugas dan praktek termasuk ibadah, doa, sopan santun dan moral, bersama dengan transaksi komersial dan praktek bisnis.

2.2 Akuntabilitas Masjid

Masjid adalah simbol ibadah dan jika dimaknai sebagai akuntansi masjid maka masjid berdampingan dengan sisi maskulin akuntansi yang selalu diartikan materialis. Dalam bentuk pelaporan mereka hadir untuk saling melengkapi. Masjid adalah tempat yang dikunjungi oleh umat Islam untuk melakukan ibadah sebagai bentuk interpretasi kesyukuran atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan.

Di Indonesia banyak sekali jenis masjid yang ada, strata masjid telah ditetapkan menjadi tujuh klasifikasi yaitu:

- a. Masjid Negara, disebut sebagai Masjid Negara dan Istiqlal ditetapkan sebagai satu-satunya Masjid Negara
- b. Masjid Akbar dengan status Masjid Nasional
- c. Masjid Raya dengan status Masjid Propinsi
- d. Masjid Agung dengan status Masjid Kabupaten
- e. Masjid Besar dengan status Masjid Kecamatan
- f. Masjid Jami' dengan status sebagai Masjid Kelurahan
- g. Masjid dengan status masjid tingkat RW

Laporan keuangan memiliki peran yang penting dalam penyajian informasi yang dihasilkan dari kegiatan atau operasional Masjid. Pelaporan keuangan tersebut dilakukan oleh pengurus masjid (takmir) sebagai dasar pengambilan

keputusan dan juga sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pihak yang berkaitan dengan dana yang dikelola oleh Masjid.

Adapun aspek-aspek yang menjadi bagian dari manajemen masjid adalah terkait dengan:

- a. Sarana fisik masjid, hal ini terkait sarana dan prasana fisik yang dimiliki masjid. Misalnya ruang sholat laki-laki dan perempuan, mimbar dan podium, tempat wudhu, sound system, perpustakaan dan sebagainya.
- b. Pengurus masjid orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola masjid baik itu bersifat profesional atau volunteer yang bertugas menjalankan manajemen masjid, memiliki struktur, tanggungjawab dan wewenang sebagaimana tugas yang diberikan.
- c. Keuangan masjid, tentunya memiliki potensi mendapatkan dana dari infaq, zakat, shodaqoh dari para jama'ah. Persoalan keuangan masjid bukan hanya semata-mata mengumpulkan, mencatat dan melaporkan, maka harusnya masalah keuangan masjid harus dikelola agar mampu memberikan "kemakmuran" baik masjid maupun jama'ahnya. Secara manajemen keuangan masjid tentu menjadi hal terpenting yang harus dikelola dengan baik dan harus akuntabel.
- d. Jama'ah masjid adalah umat Islam yang menjalankan aktivitas baik sosial atau spiritual di masjid. Orang-orang yang mengunjungi dan memiliki keperluan dengan masjid baik itu bersifat rutin ataupun momentual. Jika jama'ah ini dimanajemen dengan baik maka akan menjadi potensi yang besar bagi kemajuan dan kemakmuran masjid dan jama'ahnya. Kepuasan jama'ah akan memberikan efek positif bagi perkembangan masjid tentunya.
- e. Program masjid dalam upaya memakmurkan masjid, maka pengurus masjid harus menyusun program/kegiatan yang dilakukan dimasjid.

Sumber-sumber penerimaan masjid berasal dari sumbangan dari masyarakat dan jamaah dalam bentuk infaq dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jum'at. Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan yang memberikan sumbangan dengan alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti infaq untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain. Sumber keuangan masjid juga diperoleh dari pemerintah daerah, apabila mendapatkan bantuan untuk perbaikan gedung masjid (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

Dalam organisasi masjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola masjid. Jika pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan dengan baik, itu pertanda pengurus masjid orang yang dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggungjawab (Septiany dalam Nurjannah, 2018).

2.3 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi sosial yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan layanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Perbedaan organisasi nirlaba dengan perusahaan pada umumnya adalah fokus organisasi nirlaba adalah melayani masyarakat, organisasi tidak didirikan untuk mencari laba, dan salah satu sumber dana organisasi adalah sumbangan (Setiawati, 2011).

Banyaknya kasus bahwa pengelola masjid tidak amanah dalam pengelolaan keuangan, untuk itu organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini

bagi sebagian organisasi nirlaba yang lingkupnya masih kecil serta sumber dayanya masih belum memadai, mungkin akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi nirlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena organisasi nirlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya (Fatih dalam Nurjannah, 2018).

Menurut PSAK No. 45, organisasi nirlaba perlu setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
4. Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan.

Mahsun (2007) mengemukakan bahwa Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statements of Financial Accounting Concept (SFAC) nomor 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba, yaitu:

- a. Memberikan informasi bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberikan pelayanan tersebut.
- b. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan organisasi nirlaba.
- c. Memberikan informasi bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja.
- d. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumberdaya dan kepentingan sumber daya tersebut.
- e. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode.
- f. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas.
- g. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Nurjannah (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: Psak No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf)	Kualitatif	Masjid dianggap telah memiliki akuntabilitas yang baik jika mampu menyediakan tempat ibadah yang nyaman bagi jamaah seperti fasilitas yang lengkap dalam hal ini ketersediaan air yang tidak terputus. Selain itu, pengurus masjid dianggap akuntabel jika telah menyajikan laporan keadaan keuangan masjid.
Nuraisyah (2019)	Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Lamongan Menurut Psak 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba	Kualitatif	Akuntabilitas pada Masjid Agung Lamongan dilakukan dengan memaparkan mengenai keadaan keuangan Masjid Agung Lamongan di papan-papan sebelah pintu masuk dan pengurus juga memberikan informasi mengenai keadaan keuangan Masjid Agung lamongan sebelum sholat jum'at setiap satu bulan sekali sebagai bentuk sikap akuntabilitasnya.
Dahnil Anzar Simanjuntak dan Yeni Januarsi (2011)	Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Raya Baitussalam Katapang)	Kualitatif	Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Dengan konstruksi kebudayaan yang unik di Masjid Baitusalam, sejati akuntansi dalam prakteknya mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrumen yang mendorong perilaku ibadah yang "ria".

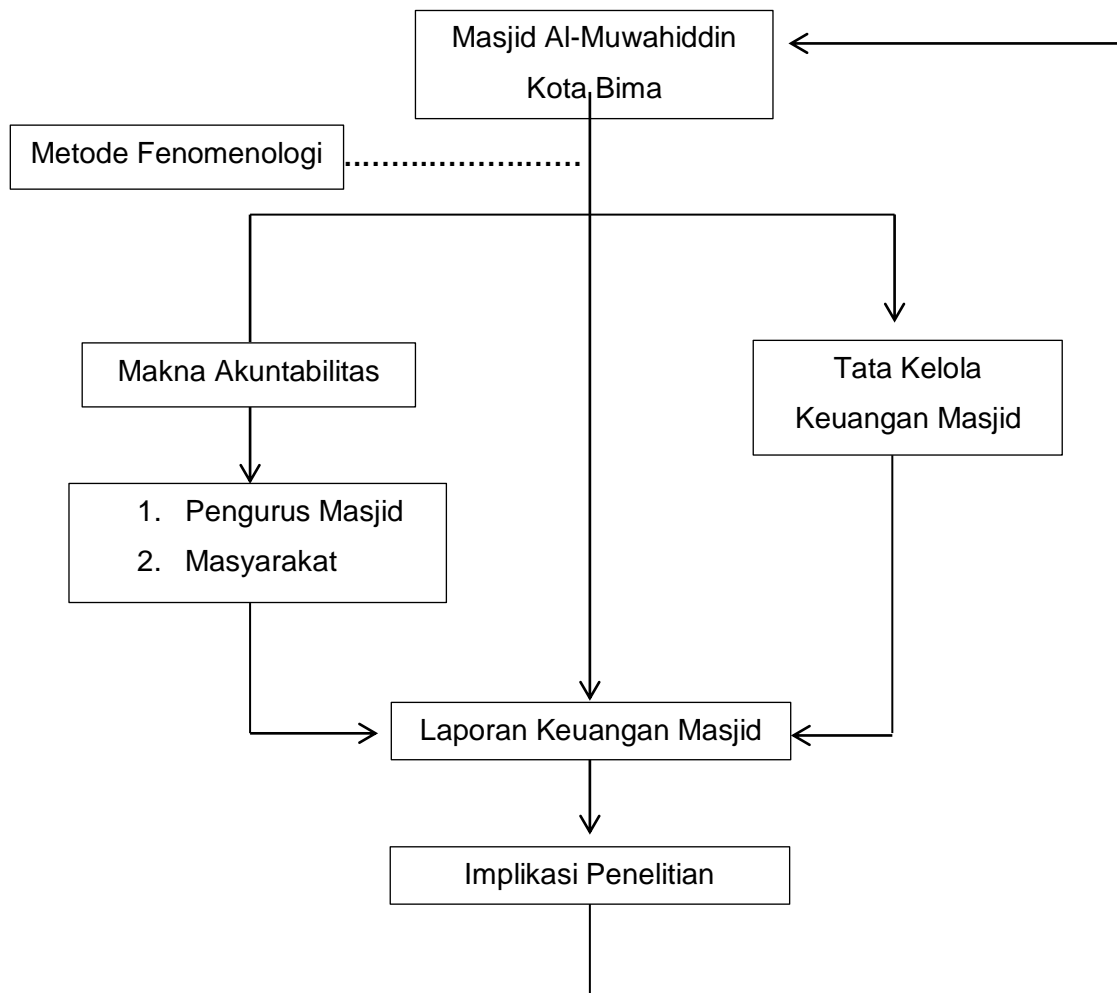
Lanjutan Penelitian Terdahulu

Roby Hanafi (2015)	Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus Pada Masjid Nurusy Syifa' Surakarta)	Kualitatif	Model pengelolaan yang dipakai oleh pengurus Masjid yaitu model pencatatan sederhana, yaitu mencatat aliran kas masuk dan aliran kas keluar lalu dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah saldo. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik sudah baik.
Uun Dwi Al Muddatstsir dkk (2018)	Praktik Akuntabilitas Masjid (Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya)	Kualitatif	Secara keseluruhan akuntabilitas MAS sudah sangat baik disebabkan karena akuntabilitas yang dihasilkan sudah terdokumentasi dan sesuai dengan SOP yang ada serta ditunjukkan kepada jamaah sebagai principle bahkan melibatkan secara langsung dalam beberapa aktivitasnya dan juga pertanggungjawabannya sudah dilaporkan kepada Pemprov Jawa Timur.
Deny Sanjaya (2019)	Evaluasi Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK 45 (Studi kasus pada Masjid Nurul Ashri Deresan)	Kualitatif	Berdasarkan analisis data bahwa laporan keuangan masjid nurul ashri masih belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) karena tidak terpenuhinya beberapa ketentuan yang terdapat pada PSAK
Junaedi Abdillah dan Eti Suprihatin (2020)	Pengungkapan Akuntabilitas dan Transparansi Masjid dalam Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi kasus pada Masjid Al-Kautsar Riung Bandung)	Kualitatif	

2.5 Kerangka Pikir

Praktik akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas khususnya Islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian, padahal dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas pada masyarakat praktik pengelolaan keuangan masjid sangatlah penting. Mengingat masyarakat/jamaah masjid termasuk donatur saat ini sudah pintar membaca keadaan masjid, sehingga untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap terjadinya praktik kecurangan atau tidak amanahnya pengurus masjid dalam hal ini bendahara masjid, takmir masjid dan lain-lain maka perlu dilakukan pencatatan laporan keluar masuknya kas.

Masjid Al-Muwahiddin kota Bima merupakan masjid yang terbesar yang terletak di Bima. Masjid ini menjadi pusat peradaban umat Islam kota Bima dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa banyak arus keluar masuk kas yang terjadi, sebagai buktinya yaitu adanya dana yang masuk dari PUPR dan APBD masing-masing 10 Milyar. Dengan banyaknya dana yang masuk ke lembaga masjid Al-Muwahiddin maka harus didukung dengan laporan keuangan masjid yang akuntabel dan rasa tanggung jawab yang besar dari pengurus masjid untuk bersikap amanah. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masjid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Metode ini digunakan oleh penulis untuk menguatkan penelitian dengan mewawancarai pengurus masjid seperti bendahara masjid dan masyarakat sekitar yang juga menjadi jama'ah serta menjadi donatur masjid.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir